



IMPLEMENTASI PERANCANGAN *CYBER PUBLIC RELATIONS* BAGI PERANGKAT DESA SADANANYA DI ERA *SMART SOCIETY 5.0*

Oleh

Irfan Nursetiawan¹, Dini Yuliani², Ii Sujai³

^{1,2,3}Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: ¹irfan.nursetiawan@gmail.com, ²diniasyari16@gmail.com,

³sudjaipnd79@gmail.com

Article History:

Received: 18-02-2023

Revised: 18-02-2023

Accepted: 20-03-2023

Keywords:

Pelatihan, Cyber Public Relations, Budaya Kerja, Pemerintahan, Pemerintah Desa

Abstract: *Tingkat literasi digital di wilayah perdesaan pada kenyataannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan, yakni selisih 2,7 persen pada tahun 2021. Hal tersebut juga berdampak pula pada penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, khususnya para perangkat desa sebagai bagian dari budaya kerja. Oleh karena itu, aksesibilitas terhadap informasi dari pihak Pemerintah Desa sulit diakses oleh masyarakat desa sebagai pengguna layanan (users). Diperlukan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan kepada pihak Pemerintah Desa, yakni berkaitan dengan pelatihan Cyber Public Relations bagi Perangkat Desa. Hal tersebut tentunya diharapkan dapat membantu dalam peningkatan akses informasi masyarakat perdesaan. Konsep Cyber Public Relations merupakan hal yang paling utama dalam implementasi program diseminasi informasi dari Pemerintah Desa Sadananya sebagai mitra dalam pengabdian kepada masyarakat di tahun akademik 2022/2023. Tahapan yang dilaksanakan dalam skema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Galuh, yaitu: (1) tahap persiapan atau inisiasi program; (2) tahap pengkajian; (3) tahap perencanaan program; (4) tahap implementasi program; dan (5) tahap evaluasi program. Pelaksanaan PKM ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan hasil, sebagai berikut: (1) adanya inisiatif untuk melakukan perancangan Cyber Public Relations; (2) peningkatan pengetahuan perangkat desa tentang platform digital; (3) inisiasi pengembangan Cyber Public Relations di tingkat pemerintahan desa; dan (4) adanya inisiasi dalam social media development*



PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital di Indonesia yang masih berada pada posisi sedang. Begitupula aksesibilitas terhadap internet di wilayah Jawa Barat baru mencapai 80,00% (persen) dan hal ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat desa.

Sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik, Pemerintah Desa tentunya harus mempunyai layanan yang bersifat terbuka dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi penting bagi masyarakat. Hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya media sosial harus bijak dan beretika (Mauludin, 2017).

Penggunaan media sosial merupakan pemanfaatan jejaring online yang dapat digunakan oleh Perangkat Desa sebagai media edukasi dan berdampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Harahap & Pasaribu, 2021).

Kondisi Perangkat Desa dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda-beda mengharuskan adanya adaptasi dengan pola perkembangan teknologi informasi. Masyarakat melalui media sosial telah menyampaikan pendapat secara deliberative (Susanto et al., 2021). Hal ini memungkinkan penggunaan media sosial ke arah yang lebih positif.

Masyarakat perdesaan tentunya mempunyai hak dalam mendapatkan akses layanan informasi dari pihak Pemerintah Desa. Masyarakat Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Indonesia, 2014). Aspirasi tersebut merupakan bagian dari feedback kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan kondisi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi di bidang pemerintahan telah melahirkan e-government sebagai transformasi bentuk pemerintah yang bersifat konvensional menjadi digital. Ruang digital bagi beberapa Pemerintah Desa sulit diimplementasikan, dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat penunjang. Strategi dalam penyampaian informasi pada saat ini tidak mesti bersifat konvensional.

Digital media relations atau social media relations menjadi kebutuhan seiring dengan adanya budaya baru di tengah masyarakat (Hidayat et al., 2020). Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi keharusan dalam peningkatan pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadananya yang dibantu oleh Perangkat Desa dan sinergis dengan para stakeholders. Hanya di dalam kegiatan tersebut tidak dipublikasikan pada website desa. Website adalah apa yang anda lihat via browser (Josi, 2017). Website tersebut merupakan media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kekurangan dalam teknik publikasi oleh Pemerintah Desa Sadananya, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan yakni dengan membentuk pola kehumasan dengan menggunakan media sosial. Terdapat beberapa media sosial yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi. Bahkan pada saat ini, pekerjaan humas telah banyak yang merangkap menjadi praktisi media sosial (Prasetyawati, 2021). Kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan dalam penyampaian konten yang berkualitas bagi



masyarakat.

2. Permasalahan Mitra

Khalayak dalam pengabdian ini, yaitu Perangkat Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Permasalahan mitra yang paling dominan, yakni terhambatnya diseminasi informasi terhadap masyarakat yang mengakibatkan beberapa informasi terlambat disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat desa yang membutuhkan akses informasi, tetapi layanan informasi dari pihak desa terbatas. Secara garis besar permasalahan mitra terbagi ke dalam 3 (tiga) masalah utama, yaitu: (1) bidang diseminasi informasi; (2) pembuatan konten; dan (3) manajemen humas. Adapun yang seharusnya dilakukan, yakni mengimplementasikan hasil konten yang sudah dibuat ke platform media sosial dengan memperhatikan aspek dari segi bahasa, teks atau tulisan, dan konten visual yang digunakan (Pratiwi & Abdurrahman, 2021).

Bukan hanya sekedar informasi yang didistribusikan, tetapi aspek kebermanfaatan juga tetap menjadi prioritas bagi humas dari Pemerintah Desa agar supaya informasi yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. Terdapat 4 (empat) langkah dalam menjaga kualitas kehumasan, yaitu dari mulai (1) perencanaan; (2) aktivasi; (3) pengawasan; dan (4) optimalisasi (Astuti, 2018; Harianja, 2020). Langkah tersebut akan membentuk kegiatan kehumasan yang komprehensif dan terkontrol.

Dengan demikian yang menjadi dasar pengabdian ini, yakni berasal dari sumber permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sadananya dan mitra dalam distribusi informasi, serta banyaknya masyarakat dalam mengakses informasi Covid-19. Pola kehumasan yang bersifat offline atau kegiatan komunikasi yang dilaksanakan secara langsung mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya: (1) jejaring yang terbatas pada skala lokal; (2) membutuhkan waktu cukup lama dalam proses distribusi informasi; dan (3) sistem kehumasan yang masih bersifat konvensional. Data dan informasi saat ini menjadi modal dalam mengamati dinamika kebutuhan akses informasi, khususnya untuk pendistribusian informasi oleh lembaga pemerintah. Perilaku masyarakat yang selalu dinamis menjadikan penyelenggara pemerintahan harus adaptif terhadap perkembangan media (Kuntardi, 2021; Tejukusumo, 2014).

Terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh Perangkat Desa Sadananya pada saat ini, yaitu berkaitan dengan bidang kehumasan. Hal ini dari hasil observasi pendahuluan didapatkan:

1. Masih rendahnya pemahaman berkaitan dengan arus informasi. Artinya Pemerintah Desa dan Perangkat Desa masih menggunakan pola kehumasan yang bersifat tradisional.
2. Latar belakang pendidikan yang beragam sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan dalam bidang kehumasan.
3. Minimnya aksesibilitas terhadap internet yang menjadikan informasi hanya tersebar dalam skala lokal.
4. Rendahnya aksesibilitas jaringan informasi dan telekomunikasi berbasis internet. Sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas pada kewilayahan perdesaan.
5. Kurangnya modal untuk pengembangan kehumasan.
6. Masih minimnya promosi program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.



7. Diperlukan usaha baru yang bersifat saling menguntungkan dalam pengembangan media.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, selanjutnya Perangkat Desa Sadananya bersama dengan tim pengusul skema Pengabdian Kepada Masyarakat hibah internal Universitas Galuh melakukan diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun hasil diskusi tersebut disepakati solusi dari permasalahan tersebut, yakni dengan implementasi perancangan Cyber Public Relations di Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagai langkah dalam menyongsong smart society 5.0.

Integrasi branding image dan Cyber Public Relations bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas yang lebih luas, mendorong efisiensi pemerintahan desa dan sarana komunikasi disaat krisis, serta bencana. Hal ini tentunya akan memudahkan aksesibilitas dan jalur distribusi informasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, hal ini juga bertujuan dalam perbaikan manajemen kehumasan yang pada mulanya bersifat konvensional bertransformasi ke arah yang lebih digital. Pola pengelolaan kehumasan yang efektif dan efisien merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga atau organisasi pemerintah.

Masyarakat menilai bahwa instagram lebih mudah dan praktis dalam menyediakan informasi publik yang diinginkan. Implikasi kebijakan dalam pengelolaan Instagram agar lebih efektif dan mendukung peningkatan diseminasi informasi (Sofiana, 2016).

Walaupun dalam implementasinya, lembaga pemerintah terhambat dengan kurangnya dana untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang media sosial dan dapat membawa media sosial lembaga tersebut ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian optimalisasi sosial media dalam digital marketing dapat membantu lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi dengan valid. Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis melibatkan tim dosen yang berjumlah 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang mahasiswa dari Universitas Galuh. Tim dosen tersebut berasal dari rumpun keilmuan yang sama, yakni Ilmu Pemerintahan. Kolaborasi dari rumpun ilmu yang sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan atau platform digital tanpa menghilangkan jati diri sebagai pemberi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara administrasi maupun non-administrasi. Selain itu kegiatan ini dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa, yaitu: dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh.

Solusi permasalahan

Berikut merupakan beberapa solusi permasalahan yang ditawarkan bagi mitra dalam pengabdian ini:

1. Penyusunan strategi program media sosial
Dalam penyusunan ini menggunakan metode People-Objectives-Strategy-Technology (POST). Hal ini diharapkan agar media sosial yang akan digunakan tepat sasaran baik oleh penyelenggara layanan maupun pengguna layanan.
2. Pelatihan Pembuatan Konten
Pelatihan ini bermaksud untuk menjadikan Perangkat Desa Sadananya lebih produktif dan menghasilkan konten yang berkualitas:
 - a. Pengenalan teknik Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Time (SMART).
 - b. Pembuatan akun media sosial.
3. Penerapan Branding Image



- a. Pembuatan slogan yang relevan dengan bidang kehumasan Pemerintah Desa Sadananya.
 - b. Menentukan konten unggulan dan spesifikasi informasi yang akan disampaikan kepada khalayak ramai.
 - c. Digitalisasi kehumasan di Pemerintahan Desa.
4. Evaluasi Kegiatan Pelatihan
Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian dalam setiap materi dan pelatihan keterampilan yang telah diberikan kepada mitra, khususnya bidang kehumasan dalam bentuk transformasi digital.
5. Monitoring
Monitoring dilakukan untuk mengetahui proses perkembangan mitra sasaran dalam memecahkan beberapa permasalahan mitra yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kreativitas masyarakat sangat diperlukan. Menurut Yuliani, D., Endah, K., & Nurwanda, A. (2018), menyatakan produktivitas inovasi dan kreativitas tidak akan bekerja sendiri betapapun kondusifnya sistem sosial dan peran aktor organisasional, serta sosial bagi terciptanya produktivitas. Oleh karena itu, kunci dalam penyelesaian sosial masyarakat bertumpu pada daya inovasi dan kreativitas masyarakat itu sendiri.

Selain itu terdapat beberapa pendapat lain dalam digitalisasi bidang kehumasan, serta hal tersebut efektif dalam peningkatan interaksi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah itu sendiri. Salah satunya promosi melalui platform sosial media Instagram. Penggunaan Instagram mempunyai manfaat bagi pelaku pelayanan publik saat masa pandemi Covid-19 yaitu membuat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih terikat karena melakukan interaksi secara personal (Miladiah, A. F., & Riyanto, S., 2020).

Hal inilah yang menjadi dasar implementasi crowdsourcing dan optimalisasi sosial media bagi mitra dalam Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini. Berdasarkan atas hasil penelitian tersebut, selanjutnya peta pemecahan permasalahan dan indikator capaian dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel.1 Pemetaan Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi yang Diimplementasikan	Indikator Capaian
Kurangnya Budaya Literasi Digital para Perangkat Desa Sadananya	1. Penerapan <i>Cyber Public Relations</i> 2. Implementasi pengembangan kreativitas perangkat desa	1. Terlatihnya kompetensi Perangkat Desa dalam bersosial media bidang kehumasan. 2. Terbentuknya adaptasi Perangkat Desa dalam pemanfaatan teknologi informasi terkini.



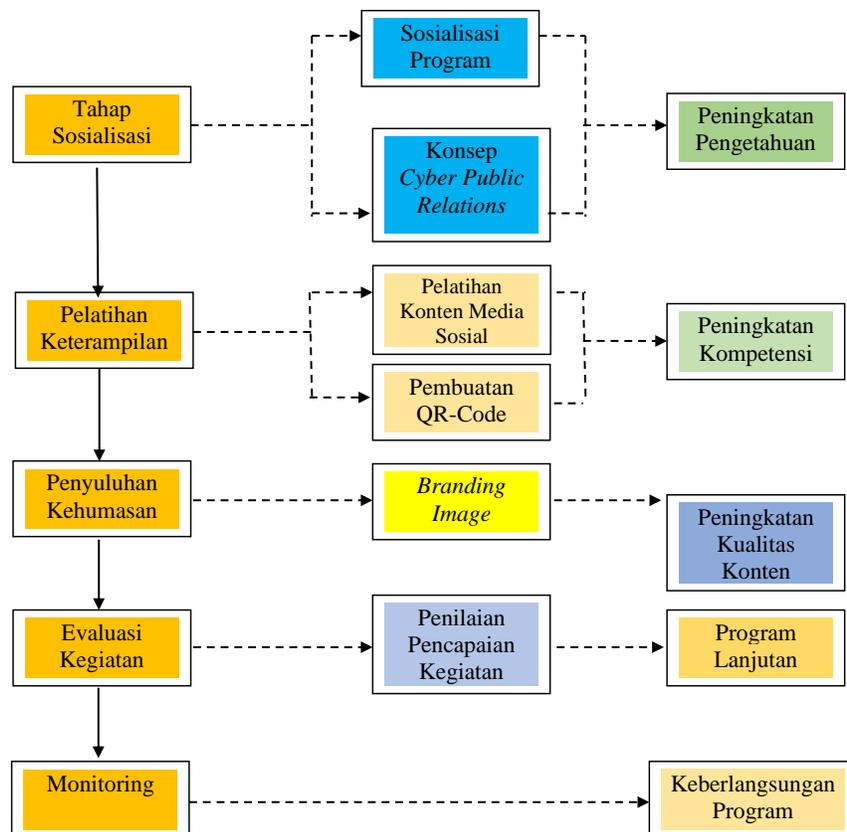
Belum adanya media publikasi Pemerintah Desa Sadananya	1. Implementasi <i>branding image</i> Pemerintah Desa Sadananya.	1. Meningkatnya pengelolaan kehumasan dan atau publikasi berbasis internet.
	2. Pembuatan dan optimalisasi sosial media.	2. Peningkatan jejaring dan jumlah pengunjung media sosial.
	3. Pengemasan konten secara kekinian dan modern (<i>update</i>).	3. Teridentifikasi jalur distribusi informasi yang seimbang.
	4. Pembuatan QR-Code untuk setiap hasil publikasi.	4. Terbentuknya <i>brand image</i> bagi Pemerintah Desa Sadananya dalam bidang kehumasan.

Sumber: Hasil Program Kemitraan Masyarakat Stimulus, 2022.

METODE

Tahapan-Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan (Program Kemitraan Masyarakat Stimulus) PKMS ini meliputi beberapa tahap digambarkan, berikut ini:



Gambar. 1 Tahapan Kegiatan

Berdasarkan Gambar. 1 tahapan-tahapan kegiatan dalam kegiatan pengabdian ini,



sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi Kegiatan
Pengabdian ini fokus pada implementasi *Cyber Public Relations* bagi Perangkat Desa di Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, yakni di minggu ke-1 dan minggu ke-2 dengan:
 - a. Sosialisasi konsep *Cyber Public Relations* yang akan diterapkan.
 - b. Sosialisasi program yang akan diimplementasikan.
2. Tahap Keterampilan
Keterampilan yang akan diberikan, yakni berupa keterampilan dengan ketentuan:
 - a. Pelatihan pembuatan konten.
 - b. Pengemasan konten sebelum dipublikasikan.
 - c. Pembuatan *QR-Code* untuk konten yang dipublikasikan.
 - d. Penyematan identitas setiap konten yang dipublikasikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk melihat perkembangan yang nampak dari mitra. Evaluasi kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan terjadwal.
4. Monitoring
Monitoring bertujuan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan program. Hal ini pula yang menjadikan kegiatan menghasilkan *output* pengabdian kepada masyarakat tepat sasaran. Selain itu, hal tersebut dapat mampu ke tahap pengembangan.

HASIL

Peta Jalan Masyarakat Digital

Peningkatan dan penggunaan aksesibilitas masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan terhadap layanan internet turut serta mendorong penggunaan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam format digital, serta serba terhubung satu dengan yang lainnya.

Hal ini mendorong tim dari PKMS untuk peningkatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial sebagai penghubung antara pihak Pemerintah Desa Sadananya dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial digunakan sebagai media promosi (Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R., 2019). Tentunya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dapat pula memanfaatkan media sosial sebagai media promosi potensi desa dan program Pemerintah Desa.

Masyarakat perdesaan telah mengenal dan memanfaatkan media sosial sebagai alat interaksi sosial di dunia internet. Masyarakat digital lahir dari proses perkembangan teknologi informasi yang telah membentuk dunia baru atau komunitas baru yaitu antara dunia nyata dan dunia maya (Malik, H., 2021).

Dinamika yang terjadi saat ini dapat dilihat dari interaksi masyarakat di media sosial. Konstruksi dalam penggunaan media sosial tentunya harus berlandaskan pada norma, nilai dan hukum yang berlaku. Penggunaan media sosial jangan mengarah pada sesuatu yang negatif dan atau yang merujuk pada SARA.

Keberagaman dan *pluralism* dalam bermedia sosial harus menjunjung tinggi nilai toleransi agar terhindar dari konflik. Berita bohong (*hoax*) dan sentimen terhadap



kelompok tertentu tentunya harus dihidari dalam bermedia sosial.

Masyarakat di wilayah perdesaan pula harus mampu dan bijak dalam menghadapi era transformasi digital. Adapun langkah yang dapat dibangun untuk menghindari dampak negatif bermedia sosial, yakni: (1) meningkatkan literasi masyarakat digital; (2) menerapkan strategi kebudayaan secara tepat sasaran; (3) menegakkan kode etik jurnalistik; serta (4) membangun sebuah regulasi yang jelas (Shaira, R. E., Nurida, T. D., & Hidayat, R., 2021).

Etik dan etika dalam bermedia sosial tentunya menjadi acuan dalam pengendalian konten negatif yang dilakukan oleh para penggunanya. Peta jalan masyarakat digital mengharuskan ketaatan dan kebijakan dalam penggunaan media sosial, serta pemanfaatan internet ke arah pembangunan yang lebih berkemajuan.

1. Implementasi Perancangan *Cyber Public Relations*

Melalui inisiasi pelatihan yang dilakukan oleh tim PKMS sebagai bagian dari langkah implementasi perancangan *Cyber Public Relations* dilakukan melalui sosialisasi kepada Perangkat Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Inisiasi ini merupakan bentuk pengembangan dari salah satu mata kuliah yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintah berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam observasi pendahuluan dilakukan melalui etnografi sebagai metode penelitian untuk media dan penelitian komunikasi dalam masyarakat informasi di era digital (Kristiyono, J., & Ida, R., 2019). Hal ini dilakukan untuk menghimpun data awal sebelum melaksanakan kegiatan PKMS.

Kegiatan dalam inisiasi ini dilakukan melalui:



Gambar 2. Inisiasi Program

Sumber: Hasil PKMS, 2023.

Perancangan program sebagai tahapan awal dalam implementasi perancangan *cyber public relations* digunakan untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Perencanaan dilakukan dengan penentuan fokus, lokus dan *output* dari hasil kegiatan PKMS.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pola pelatihan yang mengarah pada bentuk transformasi digital bidang kehumasan, khususnya dalam pemerintahan desa.

Pengenalan literasi digital pula kami lakukan sebagai bagian dari pengembangan perancangan *cyber public relations*. Manfaat literasi digital yang dapat dirasakan yaitu menghemat waktu, belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, selalu memperoleh informasi terkini, selalu terhubung, membuat keputusan lebih baik, dapat membuat anda bekerja, membuat lebih bahagia, dan mempengaruhi dunia (Sumiati, E., & Wijonarko, W., 2020).

Artinya literasi digital dapat meningkatkan daya skeptis dalam penentuan keputusan



yang dikorelasikan dengan data dan informasi yang didapatkan. Sumber data dan informasi yang relevan merupakan hal yang sangat penting bagi penentu, serta pengambil kebijakan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam PKMS ini, yaitu terbentuknya pola pikir Perangkat Desa Sadananya dalam memanfaatkan media sosial untuk bidang kehumasan. Selain itu, paradigma yang dibangun melalui literasi digital telah menginisiasi langkah dari Pemerintah Desa menuju penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari pemerintah dan perangkat desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Proses pelayanan masih diselenggarakan dalam bentuk konvensional. Ketika masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat digital, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan pun seharusnya adaptif dengan perkembangan tersebut.

Dalam hal konteks penyelenggaraannya hendaknya ada penguatan kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di tingkat desa, agar tercipta, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menuju *good village government* (Mulyono, S. P., 2014).

Transparansi dan partisipasi merupakan bagian yang penting dalam menghadapi era transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Inisiasi kegiatan yang telah dilakukan memberikan hasil cukup baik dalam peningkatan literasi digital para Perangkat Desa Sadananya dan memberikan stimulus untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Program tersebut telah memberikan dampak dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Desa dalam menyajikan dan mengolah data menjadi informasi yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu, hal ini menjadi konsepsi pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Nursetiawan, I., Sujai, I., Prabowo, F. H. E., & Yuliani, D. (2022)). Pemberdayaan merupakan bentuk dari kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan yang bertumpu bukan hanya pada ekonomi masyarakat desa, tetapi harus menjadikan masyarakat desa berpikir konstruktif dalam era *smart society 5.0*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelatihan perancangan *Cyber Public Relations* bagi Perangkat Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan apresiasi positif dari semua pihak yang terlibat.
2. Diperlukan pengembangan dalam pengemasan pelatihan untuk intensitas waktu pelatihan.
3. Adanya stimulus seluruh peserta kegiatan untuk adaptif dalam penggunaan media sosial sebagai sarana kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat perdesaan.
4. Diperlukan inisiasi dalam perancangan *social media development* yang berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak LPPM Universitas



Galuh yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Progam Kemitraan Masyarakat tahun anggaran 2022.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Astuti, R. A. (2018). Implementasi Strategi Kehumasan UAJY di Era Digital.
- [2] Harahap, S. K., & Pasaribu, Y. H. (2021). Edukasi Hukum dalam Penggunaan Jejaring Sosial pada Perangkat Desa Tanjung Beringin I. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 104–108.
- [3] Harianja, N. (2020). pengaruh kompetensi komunikasi dan profesionalisme public relations officers terhadap kualitas layanan kehumasan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- [4] Hidayat, D., Gustini, L. K., & Dias, M. P. (2020). Digital Media Relations Pendekatan Public Relations dalam Menyosialisasikan Social Distancing di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 257–268.
- [5] Indonesia, R. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Undang-Undang, 1–311, 1–311.
- [6] Josi, A. (2017). Penerapan Metode Prototyping Dalam Pembangunan Website Desa (Studi Kasus Desa Sugihan Kecamatan Rambang). *Jurnal Teknologi Informasi Mura*, 9(1).
- [7] Kristiyono, J., & Ida, R. (2019). Digital etnometodologi: Studi media dan budaya pada masyarakat informasi di era digital. *Ettisal Journal of Communication*, 4(2), 109-120.
- [8] Kuntardi, D. V. S. (2021). Dinamika Sistem Sosial Masyarakat Pedesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 1–10.
- [9] Malik, H. (2021). Cyber Religion Dan Real Religion Di Tengah Masyarakat Digital. *KOMUNIKA*, 4(1), 63-78.
- [10] Mauludin, M. A. (2017). Cerdas Dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi Dan Informasi Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. *Dharmakarya*, 6(1).
- [11] Miladiah, A. F., & Riyanto, S. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Pemasaran Sayuran Oleh Sayurkita. *mlg Saat Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(3), 172-179.
- [12] Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- [13] Nursetiawan, I., Sujai, I., Prabowo, F. H. E., & Yuliani, D. (2022). Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Maju Lestari Melalui Branding Image Budidaya Lebah Trigona di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 3593-3600.
- [14] Prasetyawati, A. (2021). Dualisme Dampak Pemanfaatan Media Sosial Tiktok dalam Humas Pemerintah. *Jurnal Komunikasi Global*, 10(2), 229–250.
- [15] Pratiwi, A. P., & Abdurrahman, M. S. (2021). Strategi Pengelolaan Media Sosial Instagram Humas Pemkot Bandung Di Masa Pandemi Covid-19. *EProceedings of Management*, 8(3).
- [16] Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71-80.



- [17] Shaira, R. E., Nurida, T. D., & Hidayat, R. (2021). Populisme dan Intoleransi Dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Digital Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 43-52.
- [18] Sofiana, M. (2016). Instagram Sebagai Media Publikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [19] Sumiati, E., & Wijonarko, W. (2020). Manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi Covid-19. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(2), 65-80.
- [20] Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). Menggunakan Media Sosial Ramah Hukum. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- [21] Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- [22] Yuliani, D., Endah, K., & Nurwanda, A. (2018). Identifikasi Karakteristik Kreativitas Masyarakat Menuju Desa Inovatif (Studi Di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 40-52.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN